

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meningkatkan kinerjanya agar menerapkan akuntabilitas publik guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan pemerintah dalam menyampaikan laporan keuangan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain dapat

dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Di Indonesia terdapat banyak permasalahan mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terlihat dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah, kurangnya pengaruh kompetensi yang dimiliki staf akuntansi, serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin Ilmu Akuntansi. Dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Entitas

pemerintahan membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan guna menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas

Menurut Nordiawan dalam Ihsanti (2010), sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini

yang diberikan pemeriksa yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil audit BPK, banyak pemerintahan daerah yang belum menyajikan laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2014 terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD, serta 1 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini TMP ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Dari hasil audit BPK di atas, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kompetensi dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya Yosefrinaldi (2008) yang menemukan bukti empiris kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Wati, dkk (2014) menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Emilda (2010) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya

manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, serta penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian Drama (2010) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2014) mengenai Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi serta sampel dari penelitian ini yaitu SKPD kabupaten/ kotadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. BATASAN MASALAH PENELITIAN**

Penelitian ini, variabel independen meliputi, kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi.

## **C. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota Se- kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta?
3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota Se- D.I. Yogyakarta.

2. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh perapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota Se- D.I.Yogyakarta.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota Se- D.I.Yogyakarta.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota Se- D.I.Yogyakarta.
5. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota Se- D.I.Yogyakarta

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penambah pengetahuan pembaca mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan SKPD. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai pengaruh mengenai kompetensi Sumber Daya

Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD serta memberikan gambar mengenai tingkat kualitas laporan keuangan SKPD pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2. Manfaat Praktis**

Menyediakan informasi kepada pemerintah serta pihak lain yang terkait mengenai tingkat kualitas laporan keuangan SKPD. Menyampaikan informasi, apakah kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD.